

THE STIGM and COMMUNICATION PATTERN of RADICAL-LABELED GROUP COMMUNICATION in BENGKULU

Alfarabi, Panji Suminar

Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, alfarabi@unib.ac.id

Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, soeminar1962@yahoo.com

Abstract:

Bengkulu Province is an area that according to a survey by the National Counterterrorism Agency (BNPT) in 2017 has the highest potential for radicalism in Indonesia. The BNPT data is quite surprising because Bengkulu province has never been recorded as a place of radicalism and terrorism. This research explores the causes of religious groups that are considered radical in Bengkulu province. The method used in this research is qualitative with a case study approach. The results of the study provide the fact that there is a growing discourse in society that creates the image of SS s as a radical group in North Bengkulu and Rejang Lebong districts. The SS label as a group that adheres to radicalism can be explained from two perspectives. First, from the internal side, this group lives exclusively and does not interact intensely with the surrounding community. This exclusive life makes the perspectives, attitudes and behavior of SS group members differ from those of society. Differences in viewpoints, attitudes and actions become the embryo for conflicts with the surrounding community, especially in terms of beliefs. Meanwhile, from the second point of view, the surrounding community has also labeled the SS group as adherents of radicalism without knowing what the meaning and limitations of radicalism itself are. The role of the mass media in reporting on radical groups with several easily recognizable symbols such as robes, veils and beards also influences people's perceptions of the SS groups around them. This condition was further strengthened by the labeling carried out by several religious and community leaders who were used as references to portray SS groups. The label and image of radicalism in the end make the SS group's relationship with the surrounding community social distancing and foster stereotypes and prejudice.

Keywords: *exclusivity, label, prejudice, radicalism, Bengkulu*

Abstrak :

Provinsi Bengkulu merupakan wilayah yang menurut hasil survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tahun 2017 memiliki potensi radikalisme tertinggi di Indonesia. Data BNPT tersebut cukup mengejutkan karena provinsi Bengkulu tidak pernah tercatat sebagai tempat terjadinya radikalisme dan terorisme. Penelitian ini menelusuri penyebab kelompok agama yang dianggap radikal di provinsi Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian memberikan fakta bahwa terdapat wacana yang berkembang di masyarakat yang membuat citra SS sebagai kelompok radikal di kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Rejang Lebong. Label SS sebagai kelompok yang menganut radikalisme dapat dijelaskan dalam dua sudut pandang. Pertama dari sisi internal kelompok ini hidup secara eksklusif dan tidak berinteraksi secara intens dengan masyarakat sekitarnya. Kehidupan eksklusif ini membuat cara pandang, sikap dan perilaku anggota kelompok SS memiliki perbedaan dengan masyarakat. Perbedaan cara pandang, sikap dan tindakan menjadi embrio bagi pertentangan dengan masyarakat sekitar khususnya dalam hal keyakinan. Sementara dari sudut pandang kedua, masyarakat sekitar juga telah melabeli kelompok SS sebagai penganut paham radikalisme tanpa mengetahui apa makna dan batasan radikalisme itu sendiri. Peran media massa dalam memberitakan kelompok radikal dengan beberapa simbol yang mudah dikenali seperti jubah, cadar dan janggut ikut mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kelompok SS di sekitar mereka. Kondisi itu juga makin diperkuat dengan pelabelan yang dilakukan oleh beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dijadikan rujukan untuk mencitrakan kelompok SS. Label dan citra radikalisme pada akhirnya membuat hubungan kelompok SS dengan masyarakat sekitar memiliki jarak sosial dan menumbuhkan stereotip serta prasangka.

Kata kunci: Eksklusif, label, prasangka, radikalisme, Bengkulu

Received: 12-11-2021; accepted: 16-11-2021; published: 01-12-2021

How to Cite:

alfarabi, alfarabi, & Suminar, P. (2021). Pelabelan Kelompok Agama Di Wilayah Yang Memiliki Potensi Radikalisme Tertinggi Di Indonesia. Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, 12(2), 228-249.

<https://doi.org/10.32923/maw.v12i2.2045>

A. Pendahuluan

Mencermati hasil survei yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) pada tahun 2017 mengungkap data tentang provinsi yang memiliki potensi radikalisme tertinggi di Indonesia. Pada peringkat pertama diduduki oleh Provinsi Bengkulu.

Tabel 1. Survei BNPT Tahun 2017

No	Provinsi	Potensi Radikalisme
1	Bengkulu	58,58%
2	Gorontalo	58,48%
3	Sulawesi Selatan	58,42%
4	Lampung	58,38%
5	Kalimantan Utara	58,32%

Sumber: ¹; ²

Peringkat pertama yang diduduki oleh Provinsi Bengkulu cukup mengejutkan karena BNPT sendiri pada tahun 2016 telah merelease dua belas provinsi merah yang ditenggarai sebagai wilayah radikalisme dan terorisme di mana Provinsi Bengkulu tidak termasuk di dalamnya. Hasil penelitian BNPT diukur dari pelaku maupun korban terorisme yang berasal dari provinsi tertentu.

Tabel 2. Dua Belas Daerah Zona Merah Terorisme menurut BNPT

No	Provinsi
1	Jawa Tengah
2	Aceh
3	Jakarta
4	Banten
5	Jawa Barat
6	Jawa Timur
7	Kalimantan Timur

¹ Didi Syafirdi, 'Survei BNPT; Lima Daerah Ini Memiliki Potensi Radikal Cukup Tinggi', <https://www.Merdeka.Com/Peristiwa/Survei-Bnpt-Lima-Daerah-Ini-Memiliki-Potensi-Radikal-Cukup-Tinggi.Html> (<https://www.merdeka.com/peristiwa/survei-bnpt-lima-daerah-ini-memiliki-potensi-radikal-cukup-tinggi.html>, 28 November 2017).

² Agus Supono, 'Survei: Potensi Radikalisme Patut Diwaspadai', http://Rri.Co.Id/Post/Berita/461816/Nasional/Survei_potensi_radikalisme_patut_diwaspadai.Html, 28 November 2017.

8	Kalimantan Utara
9	Sulawesi Selatan
10	Sulawesi Tengah
11	Nusa Tenggara Barat
12	Bali

Sumber: Ali Fitriana (2016), 'Ini 12 Daerah Yang Masuk Zona Merah Terorisme'³

Data yang dirilis oleh BNPT tahun 2017 memberitahukan bahwa ada kondisi di Bengkulu yang memberi ruang bagi berkembangnya isu radikalisme di daerah tersebut. Hasil survey itu merupakan suatu *early warning* yang harus segera diantisipasi agar perkembangannya tidak meningkat dan meluas.

Kajian yang berhubungan tentang radikalisme dan terorisme di Bengkulu pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Pertama adalah kajian yang dilakukan oleh Sary⁴ tentang upaya pencegahan paham radikalisme oleh guru rumpun pendidikan agama Islam pada siswa di Madrasah Aliyah Kota Bengkulu. Selanjutnya kajian yang dilakukan oleh Febrini dkk⁵ tentang persepsi masyarakat Bengkulu terhadap radikalisme mengungkapkan bahwa Masyarakat kota Bengkulu memahami Islam Radikal sebagai kelompok-kelompok yang beraliran keras dalam menuntut penegakan syari'at dengan jalan yang dianggap sebagai Jihad.

Berdasarkan kajian terdahulu terdapat beberapa poin penting yang bisa diambil untuk menjelaskan keadaan Bengkulu yang dianggap memiliki potensi radikalisme tertinggi di Indonesia. Poin tersebut adalah permasalahan fanatisme, teknologi informasi, kemiskinan, dan latar belakang pendidikan serta agama. Namun demikian hasil penelitian terdahulu hanya berada dalam tingkatan persepsi masyarakat serta dalam ruang lingkup yang sempit di sekolah dan di

³ Ali Fitriana, 'Ini 12 Daerah Yang Masuk Zona Merah Terorisme', <https://Regional.Kompas.Com/Read/2016/06/01/07410011/Ini.12.Daerah.Yang.Masuk.Zona.Merah.Terorisme.>, 2016.

⁴ 'Mencegah Penyebaran Paham Radikalisme Pada Sekolah', *Manthiq*, 2.2 (2017), 191–200.

⁵ 'Persepsi Masyarakat Kota Bengkulu Mengenai Gerakan Islam Radikal', *Manhaj*, 4.1 (2016), 69–78.

wilayah Kota Bengkulu. Sementara kajian lapangan terhadap kelompok masyarakat yang dianggap penganut radikalisme secara langsung belum pernah dilakukan. Selain itu karena radikalisme juga berhubungan dengan konstruksi yang dibangun di internal kelompok yang dianggap penganut radikalisme dan di internal masyarakat sekitar, maka untuk menjelaskan situasi tersebut diperlukan kajian terhadap situasi dan kondisi yang membuat kelompok tertentu di provinsi Bengkulu dianggap sebagai penganut paham radikalisme.

Kekosongan penelitian tentang situasi dan kondisi pada kelompok masyarakat yang dianggap menganut paham radikalisme dibedah dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini dapat menjelaskan mengapa hasil survei BNPT menempatkan provinsi Bengkulu sebagai wilayah dengan potensi radikalisme tertinggi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui situasi dan kondisi yang dianggap mendukung perkembangan radikalisme di Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi potensi radikalisme yang berkembang serta mencegah meningkatnya radikalisme menjadi tindakan terorisme.

Perkembangan radikalisme di Bengkulu juga turut menjadi perhatian perangkat penegak hukum. Tahun 2014 Polda Bengkulu telah mengidentifikasi tiga kabupaten yang disinyalir sebagai wilayah perkembangan radikalisme. Tiga kabupaten tersebut adalah Bengkulu Utara, Rejang Lebong dan Kaur⁶. Data tentang wilayah radikalisme di Bengkulu sampai saat ini masih mengacu pada data yang dikeluarkan Polda Bengkulu tahun 2014 tersebut. Dari ketiga wilayah tersebut, dipilih dua lokasi yaitu Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Rejang Lebong sebagai wilayah riset oleh peneliti.

⁶ Firmansyah, 'Mengapa Bengkulu Jadi Tempat Nyama Bagi Teroris', <https://Regional.Kompas.Com/Read/2014/08/07/15541731/Mengapa.Bengkulu.Jadi.Tempat.Nyama.n.Bagi.Teroris.>, 2004.

Radikalisme dapat dipahami sebagai suatu sikap seseorang yang menginginkan perubahan terhadap sesuatu dengan cara menghancurkan yang telah ada dan mengganti dengan sesuatu perubahan yang baru, yang sangat berbeda dengan sebelumnya⁷. Kepala Pusat Penelitian Politik, Adriana Elizabeth mengatakan, radikalisme berkembang di Indonesia begitu pesat. Ada empat alasan mengapa radikalisme dapat berkembang di Indonesia menurut Elizabeth. Pertama seseorang menjadi radikal untuk kepentingan personal. Hal ini menyangkut urusan ideologi maupun finansial. Kelompok radikal bisa menyebar dengan luas dengan janji-janji kebutuhan finansial yang tercukupi. Kedua karena ada propaganda politik yang menarik. Fasilitas seperti pelatihan dan transportasi bisa menjadi alasan seseorang bergabung dengan kelompok radikal. Ini bisa dilihat dalam perekrutan Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Ketiga adalah pemahaman soal penyucian diri turut menjadi alasan kuat seseorang masuk ke dalam lingkaran radikalisme. Keempat adalah etika para elit politik yang buruk. Hal itu menyebabkan publik menjadi apatis terhadap demokrasi dan menjadikan radikalisme sebagai jalan alternatif⁸.

Di Indonesia, radikalisme sering dihubungkan dengan agama. Radikalisme keagamaan sebenarnya fenomena yang bisa muncul dalam agama apa saja. Radikalisme sangat berkaitan dengan fundamentalisme, yang ditandai oleh kembalinya masyarakat kepada dasar-dasar agama. Fundamentalisme akan diiringi oleh radikalisme dan kekerasan ketika kebebasan untuk kembali kepada agama dihalangi oleh situasi sosial politik yang mengelilingi masyarakat⁹. Agama yang sering dihubungkan dengan radikalisme adalah Islam. Mubaroq dalam Sary

⁷ Sary, Noermala, 'Mencegah Penyebaran Paham Radikalisme Pada Sekolah', *Manthiq*, 2.2 (2017) p. 192.

⁸ Riani Sanusi Putri, 'LIPI Ungkap 4 Alasan Mengapa Radikalisme Berkembang Di Indonesia.', *LIPI Ungkap 4 Alasan Mengapa Radikalisme Berkembang Di Indonesia*, 2018.

⁹ Febrini, Deni, Aisyah, and Qolbi Khoiri, 'Persepsi Masyarakat Kota Bengkulu Mengenai Gerakan Islam Radikal', *Manhaj*, 4.1 (2016) p. 73.

¹⁰ mengatakan bahwa kriteria 'Islam radikal' juga dapat disebutkan sebagai kelompok yang mempunyai keyakinan ideologis tinggi dan fanatik yang mereka perjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung, dalam kegiatannya mereka seringkali menggunakan aksi-aksi yang keras, bahkan tidak menutup kemungkinan kasar terhadap kegiatan kelompok lain yang dinilai bertentangan dengan keyakinan mereka, secara sosio-kultural dan sosio-religius, kelompok radikal mempunyai ikatan kelompok yang kuat dan menampilkan ciri-ciri penampilan diri dan ritual yang khas.

Turmudi dalam Asrori¹¹ menyatakan bahwa dalam konstelasi politik Indonesia, masalah radikalisme Islam makin besar karena pendukungnya juga makin meningkat. Akan tetapi gerakan-gerakan ini lambat laun berbeda tujuan, serta tidak mempunyai pola yang seragam. Ada yang sekedar memperjuangkan implementasi syari'at Islam tanpa keharusan mendirikan "negara Islam", namun ada pula yang memperjuangkan berdirinya negara Islam Indonesia, di samping yang memperjuangkan berdirinya "kekhalifahan Islam", pola organisasinya pun beragam, mulai dari gerakan moral ideologi seperti Majelis Mujahidin Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sampai kepada gaya militer seperti Laskar Jihad, dan FPI.

Zada dalam Asrori¹² menyatakan kemunculan gerakan islam radikal di Indonesia disebabkan oleh dua faktor; Pertama, faktor internal dari dalam umat islam sendiri yang telah terjadi penyimpangan norma-norma agama. Kedua, faktor eksternal di luar umat Islam, baik yang dilakukan penguasa maupun hegemoni Barat, seperti kasus gerakan Warsidi, Salaman hafidz dan Imron atau yang dikenal sebagai komando Jihad telah membangkitkan radikalisme di

¹⁰ Sary, Noermala, 'Mencegah Penyebaran Paham Radikalisme Pada Sekolah', *Manthiq*, 2.2 (2017) p. 193.

¹¹ Asrori, Ahmad, 'Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas Dan Antropisitas', *Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 9.2 (2015), 253-68 (p. 257).

¹² Asrori, Ahmad, 'Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas Dan Antropisitas', *Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 9.2 (2015) p. 259.

Indonesia. Peneliti LIPI Anas Saidi ¹³ mengatakan bahwa paham radikalisme ini terjadi karena proses Islamisasi yang dilakukan di kalangan anak muda ini berlangsung secara tertutup, dan cenderung tidak terbuka pada pandangan Islam lainnya, apalagi yang berbeda keyakinannya.

Menurut Agus dalam L Sanur ¹⁴ penanggulangan terorisme di Indonesia harus memperhatikan dua hal. Pertama penanggulangan terorisme tidak cukup hanya dengan melakukan penangkapan namun juga harus ada upaya preventif agar ideologi tidak terus berkembang. Kedua penanganan terorisme harus menyentuh akar persoalan yang substansial yaitu memutus ideologi dengan paham jihad yang keliru. Merebaknya terorisme yang berakar dari radikalisme juga mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila mulai luntur. Munculnya radikalisme tidak terlepas dari adanya polarisasi keberagaman yang menimbulkan sentiment dan tafsir sempit atas suatu doktrin atau ideologi. Radikalisme terjadi akibat banyak kelompok masyarakat yang gagal mengintegrasikan nilai-nilai nasionalisme. Sebagai sebuah paham, radikalisme akan mudah mempengaruhi karakter generasi muda ¹⁵.

Mereka yang dianggap terpapar radikalisme tidak muncul dengan sendirinya, ada faktor lingkungan yang mendorong suatu kelompok dianggap memiliki potensi radikalisme. Teori yang dapat membantu menjelaskan peristiwa tersebut salah satunya adalah *labeling theory* dari Howard Becker. Mereka yang dianggap memiliki potensi radikalisme jika dilihat dari pendekatan teori *labeling* adalah individu atau kelompok yang tidak memenuhi standar kenormalan atau kewarasan masyarakat sehingga dianggap menyimpang (*devians*).

Teori *labeling* merupakan bentuk dari penjulukan yang disematkan masyarakat kepada perilaku tertentu yang tidak sesuai dengan nilai dan norma

¹³ Asrori, Ahmad, 'Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas Dan Antropisitas', *Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 9.2 (2015) p. 260.

¹⁴ L Sanur, Debora, 'Terorisme : Pola Aksi Dan Antisipasinya', *Info Singkat*, X.10 (2018), 25–30 (p. 28).

¹⁵ L Sanur, Debora, 'Terorisme : Pola Aksi Dan Antisipasinya', *Info Singkat*, X.10 (2018) pp. 28–29.

sosial¹⁶. Pada setiap sistem sosial terdapat *social expectations* (harapan orang kebanyakan) yang merupakan panduan individu dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Individu yang perilakunya tidak memenuhi *social expectations* akan dicap (*labeling*) sebagai memiliki perilaku menyimpang. Oleh karena itu menurut teori ini perilaku menyimpang bukanlah hasil dari perilaku itu sendiri, melainkan hasil penilaian dari lingkungan sosial.

Menurut Becker, penyimpangan bukanlah cara berperilaku tapi penjurukan yang diberikan oleh lingkungan sosial¹⁷. Dengan demikian sesuatu yang dianggap menyimpang sebenarnya adalah perpaduan perilaku dengan individu/kelompok yang diberi label oleh lingkungan sosial. Kesamaan perilaku memiliki fungsi yang kuat untuk keselarasan sosial. Mereka yang berperilaku berbeda akan dianggap sebagai ancaman terhadap solidaritas sosial. Upaya menjaga solidaritas sosial akan menolak mereka yang berperilaku berbeda dalam lingkungan yang sama. *Labeling* merupakan salah satu mekanisme yang digunakan oleh lingkungan sosial untuk menyatakan seseorang normal atau tidak normal, Menyimpang atau tidak menyimpang. Namun demikian *labeling* tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu.

Teori *labeling* tidak digunakan pada mereka yang terbukti melanggar aturan sosial, teori ini lebih difokuskan pada mereka yang dianggap melakukan

¹⁶ Dadi Ahmadi and Aliyah Nuraini, 'Teori Penjurukan', *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 6.2 (2005), 297–306 (p. 298) <<https://doi.org/10.29313/mediator.v6i2.1209>>; Devandra Eka Savitri, Elly Firdaus, and Suwarsono, 'Analisis Teori Labelling Dan Dekonstruksi Tokoh Dalam Novel Bulan Terbelah Di Langit Amerika Karya Hanum Salsabiela Rais Dan Rangga Almahendra', *Matapena: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 12.3 (2018), 351–76 (p. 23) <<https://doi.org/10.1016/j.phrs.2020.104743%0Ahttps://doi.org/10.1057/s41267-019-00222-y>>; Asiyah Jamilah and Aista Wisnu Putra, 'Pengaruh Labelling Negatif Terhadap Kenakalan Remaja', *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14.1 (2020), 65–80 (p. 69) <<https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8496>>.

¹⁷ Dadi Ahmadi and Aliyah Nuraini, 'Teori Penjurukan', *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 6.2 (2005), p. 298.

kesalahan dan dianggap menyimpang berdasarkan sistem hukum¹⁸. *Labeling* memberikan dampak yang besar pada mereka yang mendapatkan label dari masyarakat. Hal ini karena citra diri yang mereka miliki digantikan oleh citra diri yang diberikan oleh lingkungan. Oleh karenanya *labeling* ini akan memiliki dampak lebih besar pada mereka yang lemah atau dalam status minoritas.

Penelitian ini didesign dengan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Peneliti akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan “how” dan “why” untuk mendapatkan kedalaman penelitian¹⁹. Proses pengumpulan data menggunakan berbagai tehnik seperti wawancara mendalam, observasi, *focus group discussion* (FGD) dan pengumpulan dokumen. Analisis data menggunakan Miles and Huberman yang menekankan pada deskriptif kualitatif.

Penelitian ini dilakukan di dua tempat, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Rejang Lebong. Pemilihan dua tempat ini berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh Polda Bengkulu tahun 2014 tentang wilayah sebagai tempat perkembangan radikalisme. Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2019.

B. Pembahasan

Kelompok SS

Berdasarkan hasil wawancara dengan ZS, salah satu tokoh kelompok SS di Kabupaten Bengkulu Utara, kelompok yang ia pimpin berbeda dengan SS kebanyakan yang berbau aliran Wahabi. SS yang mereka jalankan menurut ZS tetap menjalankan syariat agama Islam, sholat berjamaah di lingkungan masyarakat (tidak berpantangan siapapun imam dalam sholat tersebut), pengkajian tafsir (ulama-ulama Salaf), menciptakan hafiz-hafiz muda, bernegara

¹⁸ Dadi Ahmadi and Aliyah Nuraini, ‘Teori Penjulukan’, *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 6.2 (2005), p. 299.

¹⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif; Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), p. 21.

dan cinta tanah air. Dalam praktik kehidupannya kelompok SS yang ia pimpin berdakwah dengan meneladani kehidupan setelah nabi, mengikuti cara kehidupan para sahabat, generasinya (sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in), dan lain-lain. ZS menyangkal kalau kelompok mereka disebut kelompok yang mendukung sistem khilafah. Menurut ZS khilafah tersebut terkesan terburu-buru karena hanya fokus pada sistemnya saja, sementara akidahnya belum ditata. Namun demikian ZS mengakui bahwa sebagai penganut aliran SS dalam beberapa kesempatan pihak keamanan pernah mengonfirmasi kejelasan atas aliran kelompok yang mereka anut.

Kelompok SS pimpinan ZS sudah memiliki sebanyak kurang lebih 500an anggota yang tersebar di Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara. Wadah keanggotaan kelompok SS pimpinan ZS berada dalam naungan sebuah yayasan.

Diakui oleh ZS jika secara umum pengikut SS anti politik praktis bahkan mereka tidak mengikuti pesta demokrasi yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Secara umum kelompok SS tetap netral dalam sistem politik. Sikap tersebut diambil karena dalam pandangan SS, sistem sistem demokrasi yang ada saat ini bukanlah ajaran yang diberikan dalam agama Islam. ZS berpendapat sistem yang cocok ialah musyawarah, dalam memilih pemimpin hendaklah dipercayakan kepada orang yang amanah, penguasa serta ulama. Individu yang dipersiapkan sebagai pemimpin hendaklah orang yang agamanya bagus, ilmunya tinggi, serta memiliki fisik yang kuat. Namun demikian dalam kondisi khusus, kelompok SS dapat mengikuti pesta demokrasi. Kondisi khusus tersebut menurut ZS jika terjadi kondisi di mana salah satu calon kuat pemimpin daerah atau anggota legislative yang maju bukanlah dari kelompok muslim. Jika kondisi tersebut terjadi maka anggota kelompok SS dapat menggunakan hak politiknya untuk mendukung calon dari kelompok muslim.

Kehidupan anggota SS dijelaskan ZS dengan menggambarkan bagaimana mereka mendidik anak-anak. Untuk bidang pendidikan, kelompok SS menurut ZS

memilih untuk tidak mensekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah formal, karena bagi mereka sekolah formal tidak menciptakan anak-anak yang soleh dan paham akan agama. Sementara bagi kelompok SS, agama itu bekal hidup di dunia dan akhirat. Untuk pendidikan anak-anak, kelompok SS lebih memilih untuk mendidik di pesantren SS yang lebih memfokuskan pada hafiz quran (menghafalkan ayat-ayat al-quran).

Selain kelompok pimpinan ZS, di Bengkulu Utara juga terdapat kelompok SS pimpinan AT. Gambaran tentang kelompok SS pimpinan AT di Bengkulu Utara didapatkan dari wawancara dengan ZS dan SU. Menurut SU, Kelompok SS pimpinan AT hidup eksklusif dan cenderung menutup diri dengan masyarakat di luar anggotanya. Selanjutnya menurut SU, SS pimpinan AT dahulunya pernah menolak untuk memasang bendera Merah Putih. Sikap tegas perangkat desa yang membuat kelompok pimpinan AT bersedia memasang bendera Merah Putih ketika memperingati hari kemerdekaan. Menanggapi banyaknya kelompok yang mengatasnamakan SS, ZS tidak menampik kondisi tersebut. Ia menegaskan kelompok SS yang sesungguhnya ialah SS yang tetap berjalan pada Ahlus-Sunnah Wal Jama'ah.

SS dan Label Kelompok Eksklusif

Hasil wawancara lapangan dengan informan AS di Kabupaten Bengkulu Utara didapatkan data tentang kelompok agama yang dianggap menganut radikalisme. Kelompok agama ini dikenal masyarakat sebagai penganut SS sehingga dipanggil dengan nama kelompok SS. Kelompok ini dianggap berbeda karena kehidupan anggotanya yang eksklusif dari masyarakat sekitar. Interaksi mereka dengan masyarakat di luar anggotanya terbatas dan lebih berorientasi ke internal kelompok dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Selain itu perbedaan yang mencolok dari kelompok SS ini adalah penggunaan atribut yang dianggap sebagai simbol-simbol keagamaan seperti memakai gamis bagi anggota laki-laki

dan menggunakan cadar dan pakaian berwarna hitam bagi anggota perempuan. Atribut tersebut menjadi mencolok karena kontras dengan masyarakat sekitar.

Selain atribut yang mudah dikenali, anggota kelompok SS juga memiliki kecenderungan berbeda dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam kehidupan sosial anggota SS bermukim secara berkelompok pada suatu wilayah. Rumah anggotanya berdekatan dan terdapat satu tokoh yang dijadikan rujukan oleh anggota yang lain. Keputusan anggota kelompok Salfi akan sangat ditentukan oleh tokoh yang dianggap pemimpin tersebut. Anak-anak anggota SS tidak disekolahkan di sekolah umum melainkan di pesantren SS yang memiliki kurikulum pendidikan yang berbeda. Dari wawancara dengan salah satu ustad yang menjadi pendidik di pesantren SS, pendidikan anak-anak di pesantren SS lebih menekankan pada hafalan surat pada kitab Alquran yang dianggap induk dari semua ilmu. Kondisi lainnya yang dianggap membedakan kelompok SS adalah penolakan mereka terhadap tradisi masyarakat. Kelompok SS menolak tradisi masyarakat melakukan yasinan, tahlilan dan ziarah kubur yang dikaitkan dengan budaya Islam. Mereka menolak dengan alasan tidak ada dasarnya dalam agama Islam sehingga dapat dikategorikan bidah (menyimpang). Namun demikian dalam batas-batas tertentu, interaksi anggota SS dengan masyarakat sekitar tetap terjadi. Kegiatan gotong-royong di kawasan desa tetap diikuti oleh anggota SS pada umumnya.

Terdapat satu sikap kelompok SS yang menimbulkan kecurigaan masyarakat dan tuduhan miring dari aparat penegak hukum. Sikap tersebut adalah orientasi politik mereka. Walaupun tidak secara vulgar, namun sikap penolakan kelompok SS terhadap sistem demokrasi di Indonesia sudah diketahui secara umum. Sikap politik tersebut diimplementasikan dengan menolak ikut serta dalam pemilihan umum, baik untuk pemilihan di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Kelompok SS memilih untuk tidak menggunakan hak mereka sebagai warga negara karena dalam ajaran yang mereka yakini hal tersebut tidak ada dasarnya dalam Islam.

Sikap tersebut membuat mereka abstain setiap ada pemilihan umum. Kondisi tersebut pada akhirnya menjadi jalan masuk bagi timbulnya kecurigaan masyarakat terhadap nasionalisme kelompok SS. Pada akhirnya simbol-simbol kenegaraan menjadi ukuran apakah anggota SS dianggap nasionalisme atau tidak. Pada hari-hari besar Republik Indonesia seperti hari kemerdekaan, rumah anggota kelompok SS akan diperhatikan, apakah memasang bendera merah putih atau tidak. Jika tidak, maka anggota SS tersebut dianggap tidak nasionalis. Situasi yang sama disematkan kepada anggota SS terhadap keikutsertaan mereka dalam ritual kenegaraan dan atribut warga negara yang dipahami masyarakat seperti upacara kemerdekaan, pengurusan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan pengurusan KK (Kartu keluarga). Kealpaan anggota kelompok SS terhadap ritual dan atribut warga negara menjadi bahan wacana terhadap nasionalisme mereka sekaligus melabeli mereka sebagai kelompok radikal.

Keterbatasan Interaksi, Informasi dan Komunikasi antara Kelompok SS dengan Masyarakat Sekitar

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, penyebab SS di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Rejang Lebong dilabeli sebagai kelompok penganut radikalisme adalah keterbatasan interaksi dan komunikasi dengan masyarakat setempat. Keterbatasan interaksi dan komunikasi pada akhirnya menyebabkan keterbatasan informasi tentang profil dari kelompok SS di daerah tersebut. Interaksi yang terbatas ini membuat penduduk desa tidak merasa kelompok SS menjadi bagian dari diri mereka. Kondisi itu membuat informasi tentang keberadaan kelompok SS menjadi terbatas dan menyebabkan penilaian berkembang tanpa mengalami proses konfirmasi. Hal inilah yang menjadi faktor pendukung ketika isu radikalisme berkembang dengan membawa simbol yang ditampilkan di media lalu dijadikan dasar dalam menilai radikalisme. Atribut pelaku terorisme di media massa yang menggunakan gamis, janggut, kening

hitam bersama istri pelaku yang menggunakan cadar serta pakaian hitam mendapatkan kesamaan dengan atribut yang digunakan kelompok SS di wilayah Bengkulu.

Batas interaksi antara masyarakat dengan kelompok SS juga terbangun karena perbedaan dalam menjalankan tradisi dengan masyarakat desa. Beberapa perbedaan tersebut contohnya adalah tentang ziarah kubur, yasinan dan tahlilan. Walaupun tiga aktifitas tersebut menggunakan bacaan dari Alquran, namun menurut kelompok SS, aktifitas tersebut tidak memiliki dasar karena tidak dicontohkan oleh nabi dan sahabat-sahabat nabi. Perbedaan cara pandang dalam menjalankan tradisi ini terkadang menjadi embrio konflik karena pernyataan kelompok SS bahwa apa yang dilakukan penduduk desa merupakan sesuatu yang dianggap bidah (istilah dalam agama Islam yang artinya perbuatan yang mengada-ada karena tidak ada. Kata bidah dalam agama Islam cenderung berada dalam konteks perbuatan yang dipersepsikan negatif). Penduduk desa tidak menerima label bidah terhadap tradisi mereka yang telah berjalan turun-temurun. Perbedaan cara pandang tersebut menjadi titik singgung antara kelompok SS dengan masyarakat desa walaupun tidak sampai menimbulkan konflik terbuka. Namun demikian perbedaan tersebut telah cukup membuat jarak interaksi masyarakat desa dengan kelompok SS menjadi terbatas.

Keterbatasan interaksi antara kelompok SS dengan masyarakat desa membuat sistem control sosial tidak berjalan dengan baik. Ketidaktahuan masyarakat tentang suatu kelompok yang hidup eksklusif membuat pencegahan secara dini tidak dapat dilakukan. Sebaliknya kelompok SS juga menjadi leluasa untuk melakukan aktifitas karena sifatnya tertutup dan tidak diketahui oleh orang dari luar kelompok mereka. Kondisi ini diduga menjadi salah satu potensi radikalisme. Kehidupan eksklusif membuat jika suatu kelompok menjalankan paham radikal, masyarakat desa di luar kelompok mereka tidak dapat memberikan control social atau peringatan terhadap kesalahan yang terjadi di

kelompok tersebut. Kehidupan eksklusif yang dibiarkan masyarakat juga membuat suatu kelompok leluasa mengadakan aktifitas yang menurut mereka sesuai dengan apa yang mereka yakini.

Kehidupan eksklusif cenderung juga menolak pendapat dan nilai-nilai yang diberikan oleh individu atau kelompok yang dianggap bukan bagian dari diri mereka. Eksklusifitas juga mendorong anggota kelompok untuk saling mempererat ikatan antarmereka karena menyadari lingkungan di luar kelompok mereka berbeda dalam penerapan nilai dan tradisi. Kondisi ini membuat jarak sosial semakin lebar dan kaku. Munculnya prasangka dan *labeling* diawali dari kesadaran akan perbedaan ini. Namun demikian perbedaan tersebut tidak memiliki ruang dialog yang luas untuk saling mengenali dan memahami apa yang menjadi dasar perbedaan tersebut. Dalam level tertentu, eksklusifitas juga memunculkan anggapan bahwa kelompok di luar mereka adalah ancaman bagi keberlangsungan eksistensi kelompok.

Perbedaan Simbol dan Nilai Dalam Menjalankan Sesuatu Pada Kehidupan Sehari-Hari

Jarak sosial antara masyarakat desa dengan kelompok kelompok SS adalah adanya beberapa perbedaan dalam cara berpenampilan sehari-hari dan perbedaan dalam pemaknaan menjalankan tradisi. Dalam masyarakat homogen, kesamaan cara hidup merupakan pengikat kehidupan sosial. Kehadiran kelompok SS yang berada pada lingkungan desa namun memiliki perbedaan ini mengusik kehidupan masyarakat desa yang cenderung memiliki kesamaan dalam simbol dan penerapan nilai-nilai. Kondisi ini menjadi dasar untuk menilai bahwa kelompok SS bukanlah bagian dari masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian, timbulnya *labeling* dan citra terhadap kelompok SS di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Rejang Lebong adalah perbedaan tampilan dan sudut pandang dalam menjalankan tradisi dengan

masyarakat sekitar. Perbedaan tersebut berangkat penilaian negatif dari kelompok SS yang membawa pemahaman baru terhadap tradisi masyarakat. Masyarakat yang menjalankan tradisi sesuai dengan keyakinan beragama mereka menjadi terganggu dengan pemahaman baru yang dibawa oleh kelompok SS. Tradisi masyarakat dianggap bidah, bahkan menjurus syirik, di mana kedua kata tersebut (bidah dan syirik) memiliki konotasi negatif jika disematkan pada kebiasaan yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Hal inilah menjadi salah satu penyebab munculnya gesekan sosial yang walaupun kecil namun menjadi embrio bagi munculnya jarak sosial antara kelompok SS dengan masyarakat desa di sekitar mereka.

Perbedaan yang mencolok yang dapat ditemui antara kelompok SS dengan masyarakat desa adalah penggunaan atribut dalam kehidupan sehari-hari. Atribut sehari-hari masyarakat desa yang cenderung homogen memiliki cara berpenampilan yang relative sama. Sementara anggota SS menggunakan atribut yang dapat dibedakan secara fisik dan langsung. Salah satu perbedaan tersebut terdapat dalam atribut sehari-hari. Kelompok yang dikenal sebagai penganut SS menggunakan pakaian khas sehari-hari. Anggota laki-laki menggunakan baju gamis, celana panjang di atas mata kaki, memiliki janggut dan kebanyakan memiliki warna hitam di dahi. Sementara perempuan anggota SS menggunakan cadar dan pakaian gamis berwarna hitam sebagai ciri khas yang mudah dikenali. Atribut yang dikenakan penganut SS terlihat mencolok jika dibandingkan dengan pakaian sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat desa.

Selain atribut yang digunakan, perbedaan masyarakat desa dengan kelompok penganut SS adalah dari pemahaman terhadap aktifitas sehari-hari, khususnya pada kebiasaan yang sudah dianggap ritual wajib bagi masyarakat desa. Kebiasaan tersebut misalnya yasinan, ziarah kubur, dan tahlilan. Kebiasaan masyarakat desa tersebut dianggap sebagai ritual keagamaan yang wajib dilakukan. Sementara dalam pemahaman kelompok SS, kebiasaan tersebut

dianggap bidah, karena tidak memiliki dasarnya pada jaman nabi. Perbedaan pemaknaan terhadap kebiasaan tersebut membuat keikutsertaan kelompok SS pada kebiasaan masyarakat menjadi terbatas. Sementara partisipasi individu dalam kegiatan yang diselenggarakan penduduk desa bukanlah sekedar pelaksanaan kewajiban tetapi juga salah satu bentuk solidaritas masyarakat desa. Kondisi tersebut menjadi salah satu pembeda sekaligus pembuat jarak antara masyarakat desa dengan kelompok penganut SS di desa tersebut. Praktiknya dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan yang dilakukan penduduk desa hanya melibatkan mereka yang tergabung dalam pemahaman yang sama, sementara aktifitas SS juga hanya melibatkan anggotanya. Kalaupun ada partisipasi di luar kelompok, sifatnya terbatas dan tidak tetap.

Radikalisme di Bengkulu; Sebuah Pendekatan Teori *Labeling*

Isu radikalisme telah menjadi konsumsi masyarakat di dua kabupaten, Rejang Lebong dan Bengkulu Utara. Hanya saja pemahaman terhadap radikalisme secara umum masih terbatas pada simbol-simbol yang ditangkap secara fisik dan sikap terhadap penerimaan simbol-simbol negara. Faktor interaksi yang terbatas antara masyarakat desa dengan kelompok SS membuat timbulnya konstruksi tentang radikalisme dihubungkan dengan pemberitaan tentang terorisme dan radikalisme di media massa. Konstruksi tentang radikalisme berkembang tanpa mendapatkan indikator yang jelas tentang batasan mereka yang terdampak radikalisme. Kondisi salah satunya disebabkan oleh minimnya sosialisasi tentang terorisme dan radikalisme oleh pihak-pihak yang terkait. Terbatasnya informasi tentang batasan terorisme dan radikalisme membuat masyarakat desa menggunakan pendekatan simbol yang di dapat dari media massa tentang penangkapan terorisme untuk melabeli kelompok SS sebagai kelompok yang terpapar radikalisme. Penangkapan pelaku teroris yang diberitakan media massa cenderung menampilkan berbagai atribut agama sebagai simbol yang mudah

dikenali oleh masyarakat. Dampak dari pendekatan ini maka konsep terorisme dan radikalisme dipahami dalam bentuk penggunaan simbol pada laki-laki yang menggunakan baju gamis, janggut, celana *cingkrang* (di atas mata kaku), dan jidat hitam. Simbol tersebut makin diperkuat jika laki-laki tersebut memiliki keluarga baik istri maupun anak perempuan yang mengenakan gamis berwarna hitam dan bercadar. Simbol-simbol ini dijadikan acuan awal untuk menilai perilaku-perilaku anggota kelompok yang dilabeli terpapar radikalisme.

Di luar simbol-simbol yang didapatkan dari media massa, *labeling* juga dilakukan oleh masyarakat melalui perbedaan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam teori *labeling*, masyarakat memiliki harapan terhadap perilaku anggotanya (*social expectations*) agar sesuai dengan ketentuan umum yang berjalan di tengah aktivitas sehari-hari. Keberadaan kelompok SS yang memiliki perilaku yang berbeda dengan masyarakat desa dianggap sebagai bentuk dari penyimpangan. Penolakan anggota SS untuk mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa memunculkan anggapan bahwa kelompok SS adalah kelompok menyimpang dan diberi label terpapar radikalisme. Ketidaktahuan masyarakat desa terhadap isu radikalisme dan terorisme serta keterbatasan interaksi dengan kelompok di wilayah mereka membuat masyarakat desa melakukan *labeling* berdasarkan simbol-simbol yang mereka pahami lewat media massa. Simbol radikalisme dan terorisme yang masyarakat dapatkan dari media massa dijadikan ukuran untuk menentukan apakah kelompok di wilayah mereka memiliki kesamaan dengan pelaku radikalisme dan terorisme. Ketika ditemukan kesamaan simbol-simbol maka muncul prasangka bahwa kelompok di sekitar mereka penganut radikalisme. Prasangka tersebut pada akhirnya menjadi faktor penguat untuk tidak menjalin interaksi dengan kelompok yang dianggap penganut radikalisme tersebut. Prasangka awam masyarakat semakin kuat dengan pernyataan beberapa tokoh masyarakat yang juga menyatakan SS sebagai

kelompok yang harus diperhatikan dan dibina agar tidak menjadi penganut radikalisme.

Secara teori, *labeling* dapat mendorong individu atau kelompok untuk melakukan seperti yang disangkakan. Hal ini karena *labeling* membuat individu atau kelompok tidak dapat menjelaskan dirinya sendiri karena telah didefinisikan oleh orang lain. Pemberian cap/label pada kelompok SS yang dianggap menyimpang oleh masyarakat dapat menyebabkan kelompok tersebut menjadi teralienasi. Perbedaan dalam mengaktualisasikan nilai menjadi salah satu penyebabnya. Penilaian mana yang dianggap normal dan mana yang dianggap menyimpang menjadi ukuran masing-masing kelompok untuk saling melabeli. Hanya saja dalam kondisi sosial, kelompok SS jauh lebih minoritas sehingga label menyimpang lebih ditujukan kepada kelompok mereka. Pada akhirnya dalam konteks sosial, *labeling* dapat menyebabkan suatu individu atau kelompok akan melakukan apa yang disangkakan menjadi bagian dari diri mereka.

Labeling merupakan garis batas yang ditarik untuk membuat perbedaan identitas. Garis batas tersebut mendorong munculnya jarak sosial antara kelompok SS dengan masyarakat desa. SS yang minoritas dalam konteks interaksi menjadi kelompok yang dianggap eksklusif karena tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum. Pada akhirnya *labeling* kelompok menyimpang membuat SS didefinisikan secara negatif dan mendapatkan penilaian sosial yang menempatkan posisi mereka menjadi tertuduh. *Labeling* juga yang menjadi embrio bagi munculnya stigma, stereotip dan prasangka yang melahirkan diskriminasi kepada kelompok yang dilabeli tersebut.

C. Kesimpulan

Kondisi yang mendukung berkembangnya isu radikalisme di Provinsi Bengkulu diakibatkan oleh banyak faktor di mana yang pertama adalah tidak adanya kesepemahaman tentang apa yang disebut dengan radikalisme. Ketidakhahaman tersebut membuat masyarakat lebih mengandalkan simbol-simbol untuk menunjuk individu atau kelompok yang dianggap terpapar radikalisme. Hal ini juga masih ditambah oleh sikap tokoh masyarakat yang juga tidak berhati-hati dalam menunjukkan karakteristik kelompok yang dianggap terpapar radikalisme di provinsi Bengkulu. Faktor lain yang memperkuat kelompok SS dilabeli terpapar radikalisme adalah karena adanya perbedaan tindakan dan perilaku yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat sekitar. Kelompok SS yang berperilaku tidak sama dengan masyarakat desa dianggap menyimpang (*devians*). Kondisi ini juga diperkuat dengan keterbatasan interaksi antara masyarakat desa dengan kelompok SS yang dianggap eksklusif. Pada akhirnya kelompok SS yang hidup di tengah masyarakat desa di-*labeling* sebagai kelompok yang terpapar radikalisme.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Dadi, and Aliyah Nuraini, 'Teori Penjulukan', *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 6.2 (2005), 297-306
<<https://doi.org/10.29313/mediator.v6i2.1209>>
- Asrori, Ahmad, 'Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas Dan Antropisitas', *Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 9.2 (2015), 253-68
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif; Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008)
- Febrini, Deni, Aisyah, and Qolbi Khoiri, 'Persepsi Masyarakat Kota Bengkulu Mengenai Gerakan Islam Radikal', *Manhaj*, 4.1 (2016), 69-78

- Firmansyah, 'Mengapa Bengkulu Jadi Tempat Nyama Bagi Teroris', <https://Regional.Kompas.Com/Read/2014/08/07/15541731/Mengapa.Bengkulu.Jadi.Tempat.Nyaman.Bagi.Teroris.>, 2004
- Fitriana, Ali, 'Ini 12 Daerah Yang Masuk Zona Merah Terorisme', <https://Regional.Kompas.Com/Read/2016/06/01/07410011/Ini.12.Daerah.Yang.Masuk.Zona.Merah.Terorisme.>, 2016
- Jamilah, Asiyah, and Aista Wisnu Putra, 'Pengaruh Labelling Negatif Terhadap Kenakalan Remaja', *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14.1 (2020), 65–80 <<https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8496>>
- L Sanur, Debora, 'Terorisme : Pola Aksi Dan Antisipasinya', *Info Singkat*, X.10 (2018), 25–30
- Putri, Riani Sanusi, 'LIPI Ungkap 4 Alasan Mengapa Radikalisme Berkembang Di Indonesia.', *LIPI Ungkap 4 Alasan Mengapa Radikalisme Berkembang Di Indonesia*, 2018
- Sary, Noermala, 'Mencegah Penyebaran Paham Radikalisme Pada Sekolah', *Manthiq*, 2.2 (2017), 191–200
- Savitri, Devandra Eka, Elly Firdaus, and Suwarsono, 'Analisis Teori Labelling Dan Dekonstruksi Tokoh Dalam Novel Bulan Terbelah Di Langit Amerika Karya Hanum Salsabiela Rais Dan Rangga Almahendra', *Matapena: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 12.3 (2018), 351–76 <<https://doi.org/10.1016/j.phrs.2020.104743>><https://doi.org/10.1057/s41267-019-00222-y>>
- Supono, Agus, 'Survei: Potensi Radikalisme Patut Diwaspadai', http://Rri.Co.Id/Post/Berita/461816/Nasional/Survei_potensi_radikalisme_patut_diwaspadai.html, 28 November 2017
- Syafirdi, Didi, 'Survei BNPT; Lima Daerah Ini Memiliki Potensi Radikal Cukup Tinggi', <https://Www.Merdeka.Com/Peristiwa/Survei-Bnpt-Lima-Daerah-Ini-Memiliki-Potensi-Radikal-Cukup-Tinggi.Html> (<https://www.merdeka.com/peristiwa/survei-bnpt-lima-daerah-ini-memiliki-potensi-radikal-cukup-tinggi.html>, 28 November 2017)